

DINAMIKA PADA PERMUKIMAN RELOKASI TURGO DI DUSUN SUDIMORO

Ign. Purwanto Hadi

Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: adrhyan@staff.uaaj.ac.id

Abstract: *This research is about the dynamics of residents in relocation settlements, as a place to move some families from dusun Turgo affected by hot cloud disaster in 1994. Sleman Local Government provides relocation settlements and various supporting facilities so that people living in disaster prone areas can stay in a safe area of disaster, but some are unsuccessful due to certain causes. The method used is field observation and interview with villagers dusun Turgo. As a result, the relocation of settlement residents is complicated because it is related to kinship, local tradition and the sources of family income.*

Keywords: *settlement, relocation, housing*

Abstraksi: *Penelitian ini adalah tentang relokasi dan dinamika warga penghuni pada permukiman relokasi, sebagai tempat memindahkan beberapa keluarga dari Dusun Turgo yang terkena musibah awan panas pada tahun 1994. Pemerintah Daerah Sleman menyediakan permukiman relokasi dan berbagai fasilitas pendukung agar penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana dapat tinggal di kawasan yang aman bencana, tetapi ada sebagian yang tidak berhasil karena sebab-sebab tertentu. Metode yang digunakan adalah observasi lapangan dan wawancara dengan warga dusun Turgo. Hasilnya, relokasi warga permukiman bersifat rumit karena terkait dengan kekerabatan, tradisi setempat serta sumber-sumber penghasilan keluarga.*

Kata kunci: *permukiman, relokasi, rumah*

PENDAHULUAN

Gunung Merapi yang mempunyai ketinggian puncak 2.968 m dari permukaan laut, per 2006, adalah merupakan gunung berapi di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Lereng sisi selatan berada dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Magelang di sisi barat, Kabupaten Boyolali di sisi utara dan timur, serta Kabupaten Klaten di sisi tenggara. Kota Magelang dan Kota Yogyakarta adalah kota besar terdekat, berjarak di bawah 30 km dari puncak gunung Merapi.

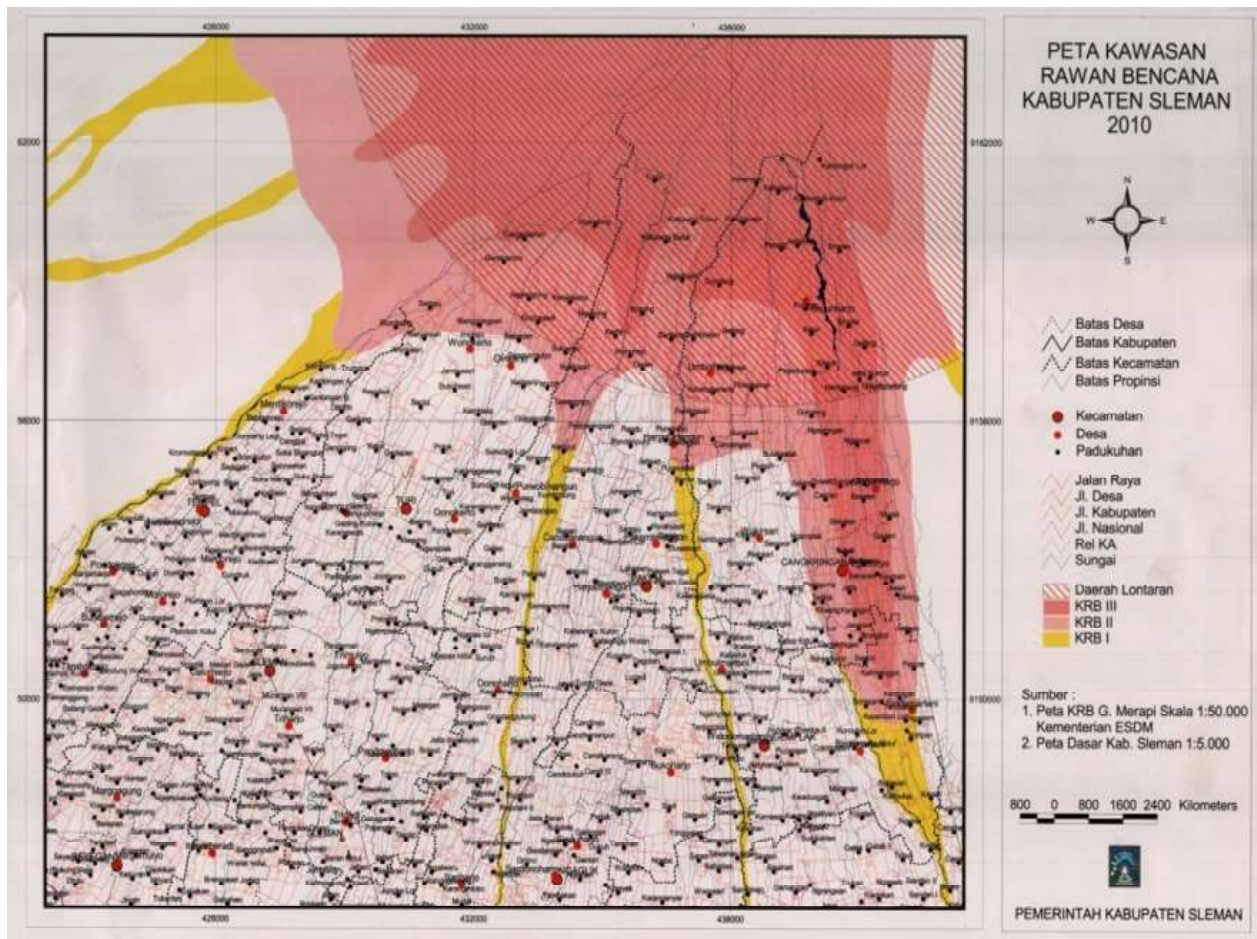
Menurut catatan, Gunung Merapi mengalami erupsi (puncak keaktifan) setiap dua sampai lima tahun sekali dan yang lebih besar sekitar 10-15 tahun sekali. Sejak tahun 1548, gunung Merapi sudah meletus sebanyak 68 kali. Pada bulan Oktober dan November 2010 terjadi letusan dan erupsi sebagai erupsi terbesar sejak letusan tahun

1872 dan menimbulkan korban nyawa 273 orang (per 17 November 2010), meskipun telah diberlakukan pengamatan intensif dan persiapan manajemen pengungsian. Letusan tahun 2010 teramati sebagai penyimpangan dari letusan "tipe Merapi" karena bersifat eksplosif disertai suara ledakan dan gemuruh yang terdengar hingga jarak 20-30 km. Letusan tahun 2010 juga membakar habis dusun Kinahrejo dan sekitarnya serta lahar panas meluncur melewati sungai Gendol sampai pada radius 17 Km, sehingga daerah yang dinyatakan berbahaya mencapai radius 20 Km dari puncak Gunung Merapi.

Menanggapi sering terjadinya dan karakteristik letusan-letusan Gunung Merapi, khususnya setelah letusan November 2010 Pemerintah Kabupaten Sleman membuat Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi. Dalam peraturan tersebut Kawasan Puncak Merapi menjadi tiga Kawasan Rawan Bencana (KRB) meliputi KRB I yang merupakan kawasan rawan bencana lingkaran

terluar atau terjauh dari pusat dan daerah aliran lava Merapi, KRB II merupakan kawasan rawan bencana lingkaran tengah dari pusat dan daerah aliran lava Merapi, dan KRB III merupakan kawasan paling rawan (Kepala Bappeda Kabupaten Sleman, Mei 2011)

Rencana kebijakan KRB III di sembilan padukuhan adalah: tidak untuk hunian, tata guna tanah untuk hutan lindung dan wisata alam, sarana dan prasarana hanya untuk menunjang penanggulangan bencana, konservasi, keperluan hutan lindung, pertanian lahan kering, wisata



Gambar-1. Peta kawasan rawan bencana Kabupaten Sleman 2010 (Sumber: Bappeda Sleman).

Pada KRB III direncanakan tidak ada pemukiman dan dimanfaatkan untuk hutan lindung dan kawasan wisata alam, tetapi banyak hambatan yang dihadapi oleh Pemda Sleman terkait dengan rencana kebijakan tersebut. Solusinya, KRB III dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah sembilan padukuhan yang terdiri dusun Pelemsari, Pangukrejo, Kaliadem, Petung, Jambu, Kopeng, Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul dan Srunen, serta wilayah yang meliputi di luar sembilan padukuhan (Kepala Bappeda Kabupaten Sleman, Mei 2011)

alam, untuk penelitian dan menunjang pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk menindaklanjutinya, Pemerintah Kabupaten Sleman menyiapkan rancangan kebijakan operasional melalui koordinasi dengan dinas-dinas terkait, seminar dan dengar pendapat dengan masyarakat. Ada tiga opsi yang disampaikan kepada warga masyarakat;

1. Semua warga masyarakat direlokasi ke bawah di luar KRB III, diberikan kapling-kapling rumah dengan memberikan ganti pembelian tanah atau dipotongkan tanah yang lama; sebagian tanah lama tetap dimiliki oleh warga yang bersangkutan, dan masyarakat dapat mengusahakan tanah untuk tumbuhnya

pakan ternak dan hasil hutan non kayu, atau bila memungkinkan diintegrasikan untuk kepentingan wisata alam.

2. Semua warga masyarakat direlokasi ke bawah di luar KRB, diberikan kapling-kapling rumah dengan memberikan ganti pembelian tanah dan tanah yang lama dibeli oleh pemerintah, dengan harga yang wajar.
3. Apabila warga masyarakat menolak direlokasi, ketika di kemudian hari terjadi erupsi Merapi lagi, pemerintah sudah tidak bersedia untuk memberikan ganti rugi atas harta kekayaan mereka yang musnah atau rusak akibat erupsi tersebut.

Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan mengadakan pertemuan langsung di desa-desa kepada tokoh-tokoh masyarakat yang meliputi 9 dusun seperti tersebut di atas, ada beberapa sikap dari masyarakat yang mengemuka, yaitu;

1. Sejumlah 5 dusun bersedia secara sukarela direlokasi di tempat lain, tetapi menolak apabila tanah miliknya yang ditinggalkan dibeli oleh pemerintah
2. Hanya 1 dusun bersedia merelokasi diri, tetapi juga menolak tanah miliknya dibeli oleh pemerintah
3. Ada 3 dusun menolak relokasi dan menolak tanah semula dibeli oleh pemerintah

Menanggapi atas beberapa sikap dari masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman mengambil kebijaksanaan sebagai berikut:

1. Relokasi di 6 dusun tetap berjalan
2. Sebanyak 3 dusun masih terus dilakukan pendekatan supaya tetap bersedia direlokasi
3. Pemerintah tidak akan membeli tanah milik masyarakat, artinya masyarakat tetap mempunyai hak memiliki atas tanah semula danenggarapnya

Bagi masyarakat yang telah lama menetap dan bertempat-tinggal apabila harus berpindah tempat tinggal ke tempat lain, yang harus mereka

pikirkan bukan hanya sekedar pindah lokasi yang jauh dari tempat rawan bencana, tetapi juga menyangkut penghidupan, dan suasana batin yang terjadi di tempat baru, terkait dengan hubungan dengan para kerabat dan alam lingkungan. Menurut John Turner (1972; 166 – 168) terdapat kaitan antara kondisi ekonomi seseorang atau sebuah keluarga dengan skala prioritas kebutuhan hidup dan prioritas kebutuhan perumahan. Seseorang atau sebuah keluarga yang berpendapatan sangat rendah cenderung meletakkan prioritas utama pada lokasi rumah yang berdekatan dengan tempat yang dapat memberikan kesempatan kerja. Bagi orang Jawa seperti halnya masyarakat di kawasan puncak merapi ada pepatah “ *mangan ora mangan sing penting kumpul*” (makan atau tidak makan yang penting berkumpul) artinya masyarakat Jawa lebih mementingkan kedekatannya dengan keluarga (kerabat).

Tentu ada berbagai alasan atau pertimbangan yang menjadi akibat timbulnya sikap masyarakat seperti tersebut, semuanya bermuara agar kehidupannya (masyarakat) tidak menjadi lebih sulit di kemudian hari. Sebaliknya, pada pihak pemerintah harus mampu melindungi dan berupaya masyarakat menjadi lebih sejahtera dalam arti yang luas. Selanjutnya, yang menjadi permasalahan, benarkah dengan relokasi masyarakat menjadi lebih sejahtera? Hal-hal apa yang perlu menjadi perhatian penting dalam merelokasi?

METODE PENELITIAN

Pada saat erupsi tahun 1994 dusun Turgo diterjang awan panas dan di antaranya menerjang rumah yang penghuninya sedang melaksanakan suatu hajatan dan banyak orang yang sedang hadir di dalamnya, sehingga banyak penduduk yang meninggal dunia (60 orang) maupun luka akibat terbakar oleh awan panas. Atas kejadian tersebut salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman adalah segera menyediakan permukiman relokasi bagi masyarakat dusun Turgo di dusun Sudimoro. Permukiman relokasi ini telah dihuni

hingga kini kurang lebih delapan belas tahun, dengan demikian dinamika yang berkembang di permukiman telah layak untuk diamati/diteliti yang selanjutnya dapat memberikan manfaat dalam kasanah ilmu pengetahuan dan dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan relokasi permukiman di kawasan rawan bencana.

Penelitian ini bersifat eksploratif (Groat & Wang, 2011; Creswell, 2011) dengan pengamatan langsung di lokasi dan melakukan wawancara terhadap Kepala Dukuh dusun Turgo, Ketua RT 5, 6 dan 7 yang membawahi Permukiman Relokasi Turgo di Sudimoro serta beberapa warga baik dari permukiman relokasi maupun warga dari Dusun Turgo.



Gambar-2. Foto luncuran awan panas (“Wedus Gembel”) tahun 1994. Sumber: (<http://www.anehnie.com> 2010)

HASIL AMATAN DAN PEMBAHASAN

Letak dan Administrasi

Dusun Turgo terletak di Desa Purwobinangun Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman dan berjarak antara 5 sampai dengan 8 Km dari puncak Gunung Merapi, masuk dalam kawasan rawan bencana III. Saat ini di dusun Turgo terdapat lima rukun tetangga (RT), RT 1 sampai dengan RT 4. Setelah terjadi erupsi awan panas 1994 oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yang didukung oleh banyak pihak dibangunlah permukiman relokasi bagi keluarga-keluarga warga dusun Turgo. Lokasi Permukiman Relokasi terletak di dusun Sudimoro ke arah bawah selatan yang berjarak kurang lebih 6 Km dari dusun Turgo (permukiman lama). Secara ad-

ministratif permukiman ini tidak masuk dalam administrasi dusun Sudimoro, walaupun secara fisik masuk wilayah padukuhan Sudimoro, tetapi tetap masuk dalam administrasi Padukuhan Turgo, di dalamnya dibagi menjadi tiga rukun tetangga (RT), yaitu RT 5, RT 6, dan RT 7.

Umumnya penduduk desa-desa yang masuk ke wilayah dalam, pada awalnya masih dalam satu garis keturunan, sehingga mempunyai kerabatan yang sangat kuat (Savitri, 2009) Nampaknya demikian juga halnya dengan penduduk dusun Turgo. Supaya kondisi dan suasana kekerabatan tidak terganggu, permukiman relokasi tetap dijadikan dalam satu padukuhan Turgo dan hanya menampung keluarga-keluarga yang berasal dari dusun Turgo.

Konsep dasar relokasi dan Keluarga-keluarga Penghuni

Permukiman Relokasi Turgo dibangun dalam dua tahap pembangunan yaitu; tahap pertama 100 rumah dan 31 rumah, di atas tanah kas desa bagi keluarga-keluarga dari dusun Turgo yang bersedia direlokasi. Masing-masing rumah dibangun secara permanen seluas 36 m² per rumah, di atas tanah seluas 100 m² serta dilengkapi prasarana jalan yang diaspal, saluran air, fasilitas ibadat berupa masjid 1 buah, gedung pertemuan 1 buah dan kandang sapi sebanyak 12 unit, per unit direncanakan berisi 20 ekor sapi serta sarana angkutan 1 buah truk.

Masing-masing keluarga yang bersedia direlokasi menempati satu rumah yang diberikan secara cuma-cuma, tanah kapling menyewa kepada desa sebesar Rp 100.000 per bulan, diberikan satu ekor sapi betina untuk dipelihara di dalam lingkungan permukiman. Pemenuhan kebutuhan pakan ternak warga mencari rumput di permukiman semula dengan memanfaatkan bantuan truk yang mereka miliki dan mereka kelola sendiri. Selain itu masing-masing keluarga yang bersedia menempati pada tahap awal pada bulan-bulan pertama juga memperoleh bantuan untuk kebutuhan hidup mereka (makan, air, pakaian).



Gambar-3. Deretan bangunan rumah di permukiman relokasi Dusun Sudimoro (dok. Pribadi, Juni 2011)



Gambar-4. Kandang sapi kosong (dok. Pribadi, Juni 2011)



Gambar-5. Gedung pertemuan di permukiman relokasi dusun Sudimoro (dok. Pribadi, Juni 2011)



Gambar-6. Masjid di permukiman relokasi dusun Sudimoro (dok. Pribadi, Juni 2011)

Pada saat penelitian dilakukan, jumlah kepala keluarga yang secara administrasi terdaftar dalam data kependudukan dan secara definitif menetap di permukiman relokasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Keluarga Terdaftar sebagai Peduduk dan yang Tinggal

RT	Jumlah Keluarga Terdaftar	Jumlah Keluarga Definitif Tinggal
RT 5	44	36
RT 6	40	38
RT 7	44	43
Jumlah	128 (100 %)	117 (91,41 %)

Sumber: Diolah dari Daftar KK dan Data Penduduk Padukuhan Turgo serta hasil wawancara dengan Kepala Dukuh Dusun Turgo, Ketua RT 5, RT 6 dan RT 7

Dari 131 rumah yang dibangun, pada tabel 2 terlihat ada 8 rumah atau 6,11 % yang ditinggalkan. Artinya tidak ada kejelasan dari penghuni awal rumah akan dihuni atau tidak (tidak membayar sewa tanah). Jumlah rumah yang tidak dihuni, artinya pemiliknya jelas serta membayar sewa tanah, namun rumah tidak ditinggali ada 6 rumah atau 4,58 %. Sesungguhnya jumlah rumah yang secara riil ditempati hanya ada 117 rumah atau 89,31 %. Bila dilihat tabel 1 dan tabel 2 ada tiga keluarga yang terdaftar sebagai penduduk di permukiman relokasi dan menelantarkan rumahnya.

Tabel 2. Jumlah Rumah Terbangun, Ditinggalkan dan yang Dihuni

RT	Jumlah Rumah	Jumlah Rumah Ditinggalkan	Jumlah Rumah Tak Dihuni
RT 5	46	6	4
RT 6	40	1	1
RT 7	45	1	1
Jumlah	131 (100 %)	8 (6,11 %)	6 (4,58 %)

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan Kepala Dukuh Dusun Turgo, Ketua RT 5, Ketua RT 6 dan Ketua RT 7

Jumlah keluarga yang definitif tinggal atau jumlah rumah yang ditempati pada saat penelitian dilakukan jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, yaitu sebelum ada penertiban oleh kepala dusun yang baru. Kondisi yang lalu ada 31 rumah dalam keadaan kosong, walaupun pernah terisi semua.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga ketika awal permukiman relokasi dibangun tidak serta merta masyarakat mendaftar untuk ikut tinggal di permukiman relokasi, walaupun akhirnya 131 rumah terbangun dapat terisi. Bandingkan dengan keluarga yang tetap tinggal di dusun Turgo saat ini ada 158 KK, belum ditambah dengan keluarga yang secara administrasi terdaftar di permukiman relokasi tetapi secara faktual tinggal di atas yaitu di dusun Turgo. Artinya, kondisi di permukiman relokasi tidak lebih menarik dibandingkan yang di atas (Turgo).

Ada beberapa alasan yang mengemuka mengapa warga tidak tertarik tinggal di permukiman relokasi. Pertama adalah menyangkut penghidupan, mereka telah terbentuk sebagai petani dan tanah telah mereka miliki dengan segala keterbatasan mereka tetap dapat hidup sementara di permukiman relokasi tanahnya hanya sebatas 100 m², sehingga mereka gamang akan penghidupan di tempat baru, padahal di sisi lain selama ini mereka sudah terbentuk menjadi petani. Bahkan ada pendapat justru berpindah di tempat relokasi mereka akan mendapatkan bencana ke dua yang lebih kronis.

Kedua, seperti diungkapkan oleh antropolog Koentjaraningrat (1972) dan Soetarjo (92), di dalam masyarakat desa ada kekerabatan yang kuat, sehingga ketika akan memutuskan sesuatu harus dipertimbangkan dari aspek keluarga atau kerabat. Mereka tidak hanya berpikir dan bertindak untuk diri sendiri, tetapi juga harus berpikir untuk anggota keluarga dan bahkan masyarakat di sekitarnya.

Ketiga, adanya tingkat kepasrahan yang tinggi, mati hidupnya manusia ada di tangan Tuhan serta mereka telah menjadi bagian dan menyatu dengan alam sekitar. Fakta bahwa ada beberapa keluarga yang pernah menghuni di permukiman relokasi atau membiarkan rumahnya tidak dihuni berpindah, yang menjadi pertanyaan adalah mereka kemana dan mengapa mereka pergi? Berdasarkan informasi dari beberapa nara sumber hanya satu keluarga yang pergi ke luar dari padukuhan Turgo yaitu turun ke arah Yogyakarta mendekati keluarga yang lain, dan selebihnya adalah kembali ke dusun Turgo karena alasan realitas kesulitan atas penghidupan di permukiman relokasi.

Prinsip penertiban oleh Kadus Baru adalah agar tidak ada daftar penduduk yang berstatus ganda antara di dusun Turgo dan di permukiman relokasi, sehingga memudahkan dalam berkoordinasi untuk berbagai tindakan yang perlu, misalnya tindakan evakuasi kala terjadi erupsi Gunung Merapi dan memastikan pendapatan dari sewa tanah. Bersamaan upaya penertiban, Kadus juga berupaya mencari kepastian keluarga-keluarga yang bersama-sama bersedia untuk mengajukan agar tanah yang ditempatinya dapat diubah statusnya menjadi hak milik dan upaya tersebut mendorong tingkat hunian naik lagi.

Atas dasar realitas dan pendapat yang muncul, terlihat bahwa bagi masyarakat desa pemilikan tanah menjadi masalah yang penting tidak hanya dari segi ekonomi dan bahkan menjadi kriteria status sosial pemilik. Tanah juga bernilai politis ketika bersinggungan dgn kepentingan kekuasaan dan muncul pada saat sosialisasi rencana pembelian tanah di permukiman semula yang oleh masyarakat dan rencana tersebut ditolak.

C. Pekerjaan Kepala Keluarga

Pekerjaan kepala keluarga yang terdaftar di permukiman relokasi pada saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Macam Pekerjaan Kepala Keluarga yang Terdaftar di Permukiman Relokasi

	Macam Pekerjaan				Jumlah
	PNS.	Peg. Swasta	Buruh	Serabutan	
RT 5	3	1		40	44
RT 6			5	35	40
RT 7	2			42	44
Jumlah	5(3,91 %)	1 (0,78 %)	5 (3,91)	117 (91,41 %)	128 (100 %)

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan Kepala Dukuh Dusun Turgo, Ketua RT 5, Ketua RT 6 dan Ketua RT 7

Dari tabel 3 terlihat kebanyakan kepala keluarga mempunyai pekerjaan sebagai tenaga serabutan. Artinya, tidak ada pekerjaan definitif untuk menopang kebutuhan hidup mereka, kadang sebagai tukang, penggali pasir atau mencangkul di sawah bila disuruh ikut menggarap sawah yang ada di sekitar permukiman oleh pemilik tanah. Mereka semula kebanyakan adalah petani atas tanah yang mereka miliki di Turgo, saat ini mereka tidak mau disebut sebagai petani karena tidak ada/mempunyai tanah garapan di sekitar permukiman relokasi.

Bahkan tanah mereka tidak tergarap lagi karena terbentur tambahan biaya untuk pengolahan maupun pengangkutan hasil panen. Kualitas tanaman juga tidak baik karena terbatas intensitas perawatan, sehingga hasil menjadi tidak efisien. Sebagai contoh, dulu mereka tidak perlu membeli sayuran karena tinggal memetik dari kebun, sekarang mereka harus membeli dan artinya meningkatkan biaya hidup mereka.

Setiap keluarga mendapat bantuan satu ekor sapi dan disediakan kandang yang dapat menampung 240 ekor sapi. Artinya, di antara mereka dapat dan diberi kesempatan untuk membawa sapi yang telah mereka miliki sebelumnya, karena sebelumnya mereka juga peternak sapi. Saat ini tinggal ada 5 ekor sapi namun bukan milik warga permukiman relokasi. Sapi yang mereka peroleh dari bantuan dan yang telah mereka miliki sebelumnya akhirnya mereka jual. Tindakan ini mereka lakukan karena tingginya biaya untuk mendapatkan

pakan sapi. Mereka kesulitan mendapatkan rumput dari sawah sekitar permukiman dan kalau mencari rumput dari tanah miliknya atau tanah milik pemerintah yang di atas (dusun Turgo) memerlukan waktu yang lebih banyak dan perlu ongkos pengangkutan, artinya perlu biaya tambahan bila dibandingkan tetap memelihara sapi di atas (lokasi awal, dusun Turgo). Ketika awal mereka mulai tinggal di permukiman relokasi, pengangkutan dapat dibantu dengan memanfaatkan truk sumbangan, tetapi timbul masalah operasional pengelolaan, akhirnya truk mereka jual dan hasil penjualannya dibagi untuk kepentingan masing-masing RT.

Tabel 4. Kondisi Bangunan Rumah Tinggal

	Kondisi Rumah			Jumlah
	Asli	Berkembang	Tidak Terawat	
RT 5	23	14	9	46
RT 6	31	7	2	40
RT 7	36	8	1	45
Jumlah	90 (68,70%)	29 (22,14%)	12 (9,16%)	131 (100%)

Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan Kepala Dukuh Dusun Turgo, Ketua RT 5, Ketua RT 6 dan Ketua RT 7

Adanya fasilitas ibadah dan gedung pertemuan sangat bermanfaat dan membantu bagi warga permukiman, dan fasilitas seksualitas itu tidak ditemui di dusun lain. Selanjutnya bila melihat kondisi bangunan rumah tinggal yang ada dipermukiman relokasi, rumah yang mengalami perluasan dan beberapa di antaranya mengalami peningkatan kualitas hanya ada 29 rumah (22,14 %), sedangkan yang masih tetap seperti bentuk semula ada 90 rumah (68,7 %) dan tidak terawat ada 12 rumah (9,16 %). Rumah yang berkembang dimiliki oleh keluarga yang kepala keluarganya bekerja sebagai PNS atau di swasta atau anggota keluarga (istri atau anak juga bekerja di sektor formal). Rumah yang tidak mengalami pengembangan (merupakan mayoritas) dimiliki oleh keluarga yang mempunyai pekerjaan serabutan (kelompok mayoritas).

Secara umum sebaliknya, rumah-rumah keluarga yang dihuni justru mengalami pengembangan secara kuantitas dan kualitas menjadi lebih baik.



Gambar-7. Rumah di permukiman relokasi yang dibiarkan rusak (Dok. Peneliti, Juni 2011)



Gambar-8. Rumah di permukiman relokasi yang telah dibangun dan dikembangkan penghuni (Dok. Peneliti, Juni 2011)

KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan pada kasus relokasi permukiman di Turgo, dari aspek ekonomi yang dilihat melalui pekerjaan penduduk dan bangunan perumahan mereka mayoritas keluarga di permukiman relokasi tidak ada peningkatan ekonomi yang signifikan dibandingkan dengan mereka yang tetap tinggal di atas yaitu di dusun Turgo. Beberapa keluarga, terutama mereka yang bekerja sebagai PNS dan swasta, dengan tinggal di permukiman relokasi

menjadi lebih diuntungkan karena akses mereka ke tempat pekerjaan lebih dekat.

Dari pengamatan juga terbukti, relokasi tidak sekedar memindah tempat tinggal dan orang, tetapi terkait secara menyeluruh dengan sumber penghidupan (potensi lokasi, akses dan penyiapan dan pendampingan keluarga). Dalam kasus Turgo walaupun kepada setiap keluarga diberi seekor sapi dan kandang, diberi peluang menggarap tanah mereka, diberi truk agar memudahkan dalam mengangkut pakan ternak, alat-alat pertanian serta hasil panennya, dalam kenyataan bantuan-bantuan tersebut tidak mendorong peningkatan penghidupan warga yang tinggal di permukiman relokasi.

Rencana pemerintah membebaskan tanah masyarakat di KRB III perlu ditinjau kembali terutama pada kawasan di luar sembilan dusun, karena menyangkut kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana, aspek politik pemilikan dan pemanfaatan tanah yang potensial menimbulkan masalah berantai, pengelolaan dan berujung pada demi kesejahteraan penduduk.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ketua Program Studi Arsitektur dan Dekan Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas dukungannya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bpk Kepala Dukuh Padukuhan Turgo, Ketua RT 5, 6 dan 7 serta beberapa warga Dusun Turgo dan warga permukiman relokasi yang menjadi responden dan nara sumber penelitian.

REFERENSI

- Budiardjo, E, 1987; *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*; Gadjah Mada University Press
- Creswell, W. J, 2010; *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*; terjemahan; Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Groat, dan Wang, D, 2001; *Architectural Research Methods*; John Wiley & Sons, Inc. USA, 2001
- Herlianto, 1976; *Perumahan*, Universitas Kristen Petra, Surabaya
- Koentjaraningrat.(1972, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Muhadjir, H. N., 2007; *Metodologi Keilmuan Paradikma Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Rake Sarasin, Yogyakarta
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011, Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi
- Savitri, A. 2009; *Desa: definisi, asal mula, bentuk, pola, ciri dan romantikanya*; Great People & City Great People & City
- Turner, J FC. 1972 ; *Freedom to Build, Dweller Control of the Houing Process*, The Macmillan Company, New York
- Untermann, R. & Small, R. 1986; *Perencanaan Tapak untuk Perumahan*, terjemahan; Intermatra, Bandung.